PERLAWANAN TUAN RONDAHAIM GARINGGING TERHADAP KOLONIAL BELANDA DI SIMALUNGUN (1865-1889)

Jalatus H. Hasugian

Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Simalungun,

Pematang Siantar

jalhs.74@gmail.com

Abstract: Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat Simalungun melakukan gerakan melawan hegemoni Belanda, sebagai wujud kesetiaan kepada pemimpinnya dan upaya menjaga kedaulatan daerah. Rondahaim Garingging bukanlah raja seluruh wilayah Simalungun, melainkan hanya Kerajaan Raya, namun ia mengajak raja-raja Simalungun lainnya untuk menentang kekuasaan Belanda. Penelitian ini dilakukan untuk: (1) mengetahui latar belakang Rondahaim mempersatukan Raja-Raja Simalungun yang merasa keberadaannya diganggu untuk melawan Belanda, (2) mengetahui bagaimana strategi Rondahaim dalam mendorong rakyatnya untuk melawan penetrasi Belanda yang bermaksud menguasai Simalungun dan (3) mengetahui strategi Belanda dalam menaklukkan seluruh kerajaan di Simalungun meskipun sebelumnya banyak perlawanan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah, melalui pendekatan kepustakaan atau studi literatur terhadap sejumlah arsip, dokumen dan buku cetak yang telah ada sebelum penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Rondahaim meninggal pada tahun 1889, setelah melakukan perlawanan sejak tahun 1865, perlawanan masyarakat Simalungun terhadap Belanda lemah. Bersama Kerajaan Panei dan Silimakuta, Kerajaan Raya akhirnya menandatangani perjanjian singkat dengan Belanda pada tanggal 4 September 1907. Menurunnya perlawanan Tuan Rondahaim sekaligus menandai berakhirnya perjuangan rakyat Simalungun melawan Belanda. Setelah itu, pemerintahan Belanda di Simalungun lambat laun mengalami perubahan kedaulatan.
Keywords : Rondahaim, Simalungun, Belanda, Kolonialisme

PENDAHULUAN

Sejarah kolonialisme di Indonesia merupakan salah satu bidang kajian yang banyak diteliti para sejarawan. Hal ini tidak lepas dari kebutuhan untuk meninjau kembali penulisan sejarah Indonesia yang umumnya dilakukan dengan menggunakan sudut pandang Eropasentris yang sarat gambaran berwajah sejarah politik. (A.M. Djuliaty Suroyo; 2000:1-2). Kolonialisme dilihat sebagai kegiatan politik bangsa-bangsa Eropa untuk menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dalam rangka

mengeruk keuntungan ekonomis melalui eksploitasi sumber-sumber daya alam yang ada.

Dalam konteks ini, penting untuk dikemukakan, bagaimana dinamika masyarakat menghadapi penetrasi kolonial (Sartono Kartodirdjo; 1987: 333). Salah satu masalah kolonialisme adalah eksploitasi ekonomi yang dilakukan hingga akhir abad ke 19 oleh Belanda. Abad 19 merupakan era Pax Nederlandica di wilayah Nusantara. Akibatnya rakyat di berbagai daerah melakukan perlawanan demi mempertahankan eksistensi dan kedaulatan daerahnya masing-masing.

Di Sumatera bagian utara, salah satu daerah yang melakukan perlawanan tersebut adalah Simalungun. Belanda melihat potensi lahan perkebunan, kesuburan tanah dan letak geografis daerah ini amat strategis secara ekonomis. Apalagi sekitar tahun 1863 Belanda sudah membuka perkebunan tembakau di Deli. Wilayah yang bersebelahan dengan Simalungun dengan lahan percobaan 75 ha oleh Jacob Nienhuys (Sartono Kartodirdjo; 1987: 333).

Kehendak Belanda disertai keinginan menguasai segala bidang, termasuk pemerintahan kerajaan-kerajaan di Simalungun mendapat perlawanan keras. Salah seorang diantaranya adalah penguasa kerajaan Raya, Tuan Rondahaim Saragih Garingging. Sejak 1865 hingga akhir hayatnya tahun 1889 tak pernah mengakui kekuasaan Belanda di Simalungun (Maknur Sinaga 1999:50).

Dalam mencapai tujuannya, Rondahaim melakukan kerjasama dengan raja-raja di sekitar Simalungun, seperti penguasa Tanah Batak, Raja Sisingamangaraja XII dan Kesultanan Aceh (W.B.Sijabat; 1982:71).

Menghadapi perlawanan Rondahaim yang pintar mengatur siasat perang, Belanda sempat kewalahan. Belanda menyebut Rondahaim sebagai Napoleon van Batak karena strategi perangnya mirip dengan Napoleon Bonaparte di Perancis (Batara Sangti 1977: 175).

Bertitik tolak dari gigihnya perjuangan tersebut, penelitian ini penting dilakukan. Agar penulisan sejarah bangsa ini tidak terfokus hanya pada daerah tertentu saja yang berskala nasional. Perlu diupayakan menggali potensi-potensi sejarah lokal berdasarkan artefak-artefak dan dokumen-dokumen sejarah yang ada. Dalam rangka merekonstruksi sejarah perjuangan rakyat di Simalungun ini, peneliti berupaya menghindari pengkultusan subjektif para tokoh sentralnya. Meskipun tidak dapat dipungkiri, bahwa peranan para tokoh yang menjadi simbol perlawanan itu sendiri sangat penting peranannya (Sartono Kartodirdjo; 1975: 215).

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah dengan langkah-langkah yakni: heuristik: kegiatan menghimpun sumber-sumber sejarah; kritik (verifikasi): meneliti apakah sumber-sumber itu sejati, baik bentuk maupun isinya; interpretasi: menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta-fakta yang telah diverifikasi; serta historiografi: penyajian hasil sintesis yang diperoleh dalam bentuk narasi sejarah (Helius, Sjamsuddin; 2007: 85-87). Metode ini dilakukan dengan pendekatan sejarah analitis (analytical history), yaitu penulisan sejarah yang memanfaatkan teori dan metodologi. Dimana penulis menjelaskan asal mula (genesis), sebab-sebab (causes), kecenderungan (trend), kondisi saat itu dan perubahannya (change) dari konteks peristiwa tentunya dengan mengaitkan

masalah sosial, politik, kebudayaan dan sebagainya (M. Dien Madjid & Johan Wahyudhi; 2014: 218).

Penulis memperoleh informasi dalam penelitian ini berdasarkan dokumen-dokumen tertulis, arsip pribadi yang tidak diterbitkan maupun buku-buku tentang Sejarah Nasional maupun sejarah Simalungun, diperoleh dari Perpustakaan Universitas Simalungun, Perpustakaan Sintong Bingei Pematang Siantar, arsip Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Rondahaim Mempersatukan Raja-Raja Simalungun

Hingga abad ke 13, di wilayah Simalungun (bekas Kerajaan Nagur) telah berdiri 4 kerajaan ditambah 2 partuanon, yakni: Kerajaan Dolog Silou, Kerajaan Panei, Kerajaan Siantar dan Kerajaan Tanah Jawa. Di samping itu terdapat 2 partuanon, yakni partuanon Raya dan partuanon Purba. Sekitar abad ke 18 muncul pula partuanon baru di Silimakuta, yang menjadi cikal-bakal Kerajaan Silimakuta, sebagai kerajaan ketujuh di Simalungun (Maknur Sinaga; 1999:45). Untuk menghindari perselisihan perbatasan, melalui Harunguan Bolon ditetapkanlah wilayah masing-masing kerajaan Marropat dengan batas sebagai berikut:

1. Kerajaan Dolog Silou (Purba Tambak) dengan wilayah bagian utara pantai timur Sumatera sampai ke pegunungan hingga ke laut Tawar (sekitar daerah Tongging dan Haranggaol).

2.Kerajaan Panei (Purba Dasuha) dengan wilayah bagian bagian pedalaman sampai pegunungan Simanuk-manuk terus ke Laut Tawar (sekitar Salbe dan Tigaras).

3.Kerajaan Siantar (Damanik) dengan wilayah bagian tengah dari pantai timur Sumatera sampai ke pegunungan Simanuk-manuk terus ke Laut Tawar (sekitar Tambun Raya dan Sipolha) sedangkan bagian timur pesisir pantai masuk kepada wilayah Kesultanan Asahan.

4.Kerajaan Tanah Jawa (Sinaga) dengan wilayah bagian hilir dari pesisir pantai timur sampai ke pegunungan Simanuk-manuk terus ke Laut Tawar sekitar daerah Panahatan, sedangkan daerah pesisir pantai timur masuk ke wilayah kesultanan Asahan.

Sistem pemerintahan dalam Raja Maroppat ini masih bersifat tradisional, di mana di samping Raja sebagai kepala pemerintahan, masih ada perangkat-perangkat kerajaan yang selalu diundang bermusyawarah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pemerintahan umum, seorang raja sebagai pemimpin kerajaan dibantu sebuah dewan yang disebut harajaan atau semacam kabinet yang terdiri dari pembesar negeri atau orang-orang kerajaan (Maknur Sinaga; 1999: 52).

Mencegah Ekspansi Perkebunan Belanda

Meluasnya ekspansi perkebunan yang dilakukan Belanda menimbulkan kemarahan rakyat di Simalungun. Mereka tidak bisa menerima kehendak Belanda yang semakin berhasrat meluaskan pengaruhnya menguasai seluruh wilayah Simalungun untuk dijadikan

lahan-lahan perkebunan. Sementara, keberadaan rakyat dan penguasa pribumi Simalungun yang telah ada sebelumnya dipaksa untuk mengakui kedaulatan pemerintahan Belanda.

Sementara ekspedisi ini terus berlangsung, pihak Belanda sudah mengadakan tindakan dibidang hukum yang makin memperkuat kedudukan monopolinya di Sumatera bagian utara. Tanah-tanah penduduk makin habis dikuasai, kemerdekaan rakyat kian menipis, sementara modal Belanda secara berangsur-angsur menguasai kehidupan dan pemerintahan masyarakat Sumatera bagian utara dan Aceh (WB. Sijabat; 1983: 142).

Perkembangan ini didukung dengan masuknya tentara (marsose) Belanda yang mengawal segala kepentingan investasinya. Menyikapi itu, rakyat di Sumatera bagian utara dan Aceh, makin bereaksi terhadap sikap Belanda tersebut. Mereka mulai mengganggu kepentingan-kepentingan Belanda dengan melakukan serangan secara bergerilya. Serangan-serangan yang makin intensnya ini dirasakan Belanda cukup membahayakan, terutama serangan Tuan Rondahaim di Simalungun, yang memiliki daerah kekuasaan cukup luas saat itu.

Penyelesaian Konflik Internal Raja-raja Simalungun

Tuan Rondahaim berupaya mendekati raja-raja Simalungun dengan melakukan penertiban penguasa-penguasa kecil. Kesepakatan itu menjadi alasan baginya untuk memperkuat pertahanan dan kedaulatan raja-raja di Simalungun guna menghadapi ekspansi Belanda. Apalagi, waktu itu penguasa-penguasa di Simalungun tengah mengalami perpecahan akibat seringnya terjadi perang antar desa maupun pembangkangan daerah-

daerah partuanon terhadap pusat kerajaan. Hal ini terutama dilihat Rondahaim, karena di Kerajaan Maroppat waktu itu, terjadi krisis kepemimpinan. Akibatnya, sering terjadi perang saudara antar kerajaan maupun antar partuanon (Budi Agustono; 2012; 57).

Kondisi ini dilihat Tuan Rondahaim sangat berpotensi merugikan perjuangan, sehingga harus dipersatukan lebih dulu, untuk menjadi sebuah kekuatan besar dalam menghadapi kekuasaan Belanda. Menyusul kesepakatan tersebut, keempat anggota kerajaan Marroppat, yakni Kerajaan Siantar, Panei, Tanah Jawa dan Dolog Silou, secara resmi meminta bantuan Tuan Rondahaim untuk mengerahkan pasukannya mempersatukan wilayah Simalungun, agar patuh pada pusat kerajaannya masing-masing.

Dalam upaya mempersatukan kerajaan-kerajaan di Simalungun, Rondahaim menertibkan antara lain: pusat Kerajaan Dolog Silou yang terdiri dari parbapaan Purba, Purba Dolog, Hinalang, Nagori Tongah, Cingkes, Tambak Bawang, Nagasaribu dan beberapa yang lainnya. Di wilayah Kerajaan Panei dilakukan penertiban terhadap parbapaan Nagoraja, Sipoldas, Dolog Batu Nanggar, Sinaman, Urung Panei dan yang lainnya.

Di Kerajaan Siantar dilakukan juga penertiban terhadap wilayah Pamatang Sidamanik, Tambun Raya dan Sipolha. Sementara, di wilayah Kerajaan Tanoh Jawa dilakukan penertiban terhadap Tuan Maligas. Meskipun kelihatannya sangat arogan, tetapi akhirnya upaya Rondahaim itu berhasil mempersatukan keempat kerajaan Marroppat menjadi sebuah kekuatan besar (Mansen Purba; 59-60).

Tuan Rondahaim menyadari jika upayanya itu mengancam daerahnya sendiri di Simalungun. Untuk memperkuat barisannya, Rondahaim terus memprovokasi rakyatnya agar menentang setiap kepentingan penjajah di Simalungun. Untuk itu, berbagai strategi dilakukannya, termasuk melatih rakyatnya untuk memahami betapa besarnya partisipasi yang harus dilakukan rakyat untuk bisa melawan kesewenang-wenangan yang dilakukan penjajah.

Upaya Mempertahankan Kedaulatan Wilayah Simalungun

Sistem pemerintahan raja-raja Simalungun yang berdaulat dalam bentuk monarki feodalistik yang berjenjang dalam bentuk piramidal, memberi arti, bahwa tidak boleh ada pihak lain di luar keluarga kerajaan memiliki tanah di Simalungun tanpa izin dari penguasa setempat (gamot, pangulu atau partuanon/parbapaan) yang merupakan keluarga vertikal maupun horizontal dari penguasa (raja). Penduduk di kerajaan-kerajaan Simalungun sama sekali tidak mempunyai "hak kepemilikan" atas tanah. Yang ada hanyalah "hak pakai dan mengusahai" (TBA. Purba Tambak; 1982: 156).

Hak milik atas tanah hanya terdapat pada keturunan raja-raja. Ketika Belanda dan investor asing hendak membuka perkebunan di Simalungun, yang mereka lakukan mula-mula adalah upaya mendekati raja-raja Simalungun. Pengusaha Belanda itu harus mengadakan negosiasi dan perundingan yang alot dengan raja-raja: Panei, Siantar dan Tanah Jawa, untuk meminta izin agar raja-raja Simalungun memberikan tanahnya sebagai konsesi dengan sistem pinjam (sewa kontrak) dengan kurun waktu tertentu. Dalam melakukan negosiasi itu, Belanda sering melakukannya

dengan kekerasan dan tekanan. Sebaliknya, meskipun ada tekanan dari pihak kolonial Belanda, raja-raja Simalungun tidak mau begitu saja menyerahkan tanah-tanahnya.

Akibatnya, sering terjadi ketegangan antara pemerintah Belanda dengan raja-raja Simalungun karena seringnya Belanda melakukan pemaksaan kehendak. Raja Sang Naualuh Damanik (Siantar) dan Raja Jontama Purba Dasuha (Panei), bersama-sama dengan Tuan Rondahaim Saragih Garingging (Raya) merupakan penguasa di Simalungun yang paling sulit diajak berkolaborasi (bersama-sama) oleh Belanda. Mereka selalu menentang intervensi Belanda yang selalu ingin bertindak menang sendiri. Ketiga kerajaan ini sering berkolaborasi menyerang pasukan Belanda. Seperti yang terjadi pada tahun 1887 di Padang Badagei, Tanjung Kasou dan Dolog Kahean. Dalam pertempuran yang tidak seimbang ini, gugurlah sebanyak 22 orang pasukan Tuan Rondahaim sebagai pejuang Simalungun (Jahutar Damanik; 1974: 53).

Pada Desember 1866 sampai Januari 1867 Controleur Labuhan Deli, J. A. M. van Cats Baron de Raet mengadakan ekspedisi ke daerah Simalungun bagian atas, melalui Delitua-Tangkahan-Salahbulan-Bukum-Barus Jahei - Nagori Jawa - Sinaman - Sampun - Nagasaribu - Hinalang dan Pamatang Purba. Sedangkan ke daerah Simalungun bagian bawah, ekspedisi dilakukan Controleur Batubara I. L. Scheemaker dengan rute: Kampung Pinang (Huta Pining) - Bunut - Parhutaan Silou - Kuala Gunung - Bosar Maligas - Pokkalan Silou Maraja dan Pardagangan (Jahutar Damanik; 1974: 82-83).

Selama tahun 1885 daerah kerajaan-kerajaan Simalungun oleh Controleur Heymans van Anroy (yang mengawasi daerah Simalungun dari Batubara) hanya sebatas melakukan penyelidikan atas daerah yang relatif masih merdeka ini. Pada 1889-1892 Controleur J.A. Kroesen dan P.A.L.E. van Dijk kembali melakukan ekspedisi dengan misi yang sama. Hasilnya, Tanah Jawa dan Siantar masing-masing mengakui kekuasaan Belanda dengan Besluit Gubernemen Belanda No. 25 tanggal 23 Oktober 1889 dan No. 21 tanggal 8 Juni 1891 yang menandai awal masuknya pengaruh pemerintahan kolonial ke Simalungun.

Meskipun pada kenyataannya, Kerajaan Tanah Jawa belum sepenuhnya mengaku tunduk kepada Belanda. Terbukti secara tiba-tiba pasukan Belanda harus menghadapi “serangan fajar” pada 11 September 1892 oleh pasukan Tuan Raimbang Sinaga penguasa Partuanon Dolog Panribuan yang anti Belanda. Pasukan ekspedisi Kroesen dan Van Dijk dilaporkan terpaksa melarikan diri menuju Simpangan Bolon dengan meninggalkan peralatan mereka. Selanjutnya, pemerintah Belanda dalam upaya aneksasinya, menghadapi perlawanan yang cukup gigih dari rakyat dan raja-raja Simalungun. Rondahaim yang berkuasa di kerajaan Raya berkali-kali menyerang Belanda di sekitar perbatasan Raya dengan Padang Badagei.

Pertengahan tahun 1887, Rondahaim menyerang Belanda di Hulu Padang dan Bandar Bejambu dan membakar bangsal-bangsal tembakau onderneming. Belanda terpaksa mendatangkan pasukannya dari Medan sebanyak 60 serdadu dibawah komando Kapten J. C. R. Schenck. Pada 9 Oktober 1887 pecah lagi pertempuran di Si Onai dengan korban tewas di pihak Raya sebanyak 22 orang dan pihak Belanda 2 orang.

Menyusul pertempuran di Sibarou 12 Oktober dengan 1 prajurit Belanda tewas. Pada 21 Oktober kembali Belanda diserang pasukan Raya di Dolog Merawan dengan korban tewas 22 orang pasukan Raya. Pasukan Kapten Schenck agaknya kewalahan melawan pasukan Raya. Apalagi mereka membakar perkampungan di sekitar Tebing Tinggi seperti di Dolog Kahean. Badjalinggei juga tak luput dari serbuan pasukan Raya dan berhasil menawan 21 orang kolaborator Belanda pada tahun 1888.

Menghadapi perjuangan Napoleon der Bataks (julukan Tichelman untuk Rondahaim) (G.L. Tichelman dalam M.D. Purba; 1977:39), Belanda bersama Sultan Deli berkoalisi membentuk pasukan ekspedisi bersenjata di bawah pimpinan Controleur Belanda. Pasukan koalisi ini maju ke Sapuruk sehingga kembali menimbulkan kontak senjata yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka maju sampai ke Beringin, namun sekali lagi kampung itu sudah kosong karena sudah lebih dulu ditinggalkan penghuninya.

Perlawanan Ekonomi dan Sosial Budaya

Setelah berangsur-angsur berhasil membangun kesadaran dan partisipasi rakyat dalam rangka memperkuat barisan angkatan perangnya, Rondahaim melakukan pembinaan diberbagai bidang lainnya termasuk ekonomi dan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan, agar kekuatan yang telah ada tidak mudah diceraiberaikan. Tetapi memahami persepsi dan tujuan persatuan yang dibangun secara bersama melalui propaganda Tuan Rondahaim yakni dalam rangka menghadapi kekuasaan Belanda.

Hasilnya, semua daerah-daerah yang telah ditaklukkan itu merupakan suatu susunan pemerintahan yang secara hirarkis tunduk

kepada kepemimpinan Rondahaim dengan pusat pemerintahannya di Pamatang Raya. Untuk urusan perang, pemerintahan kerajaan Raya telah memiliki sejumlah goraha (panglima) perang yang ahli, berani dan berpengalaman serta menguasai medan pertempuran di seluruh wilayah Simalungun.

Untuk kebutuhan logistik, baik saat berperang maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari, rakyat dianjurkan untuk makin memperluas areal perladangan. Selebihnya, dibuka pula perladangan yang dikelola kerajaan yang disebut dengan juma bolag. Perladangan ini dikerjakan secara bersama-sama dengan rakyat secara bergiliran, mulai dari menanam hingga masa panen. Agar semua rakyat berpartisipasi, juma bolag ini juga dibuka di tiap-tiap parbapaan (pangulu) yang memang memungkinkan. Menyusul perluasan perladangan itu, dibangun pula lumbung-lumbung padi di setiap daerah.

Membangun Koneksi dengan Kerajaan-kerajaan Sekitar Simalungun

Setelah pasukan Tuan Rondahaim berhasil menertibkan kerajaan-kerajaan di Simalungun, upaya berikutnya adalah melakukan koneksi (hubungan) dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Simalungun, seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Deli, Kerajaan Padang, Kesultanan Asahan, Raja Sisingamangaraja XII dari Tanah Batak maupun Kerajaan Aji Sinembah dan Tongging di Tanah Karo.

Kebetulan secara geografis, letak kerajaan-kerajaan ini berdekatan karena berbatasan secara langsung dengan wilayah Simalungun. Selebihnya, dari faktor kondisi sosial, kerajaan-kerajaan itu semuanya tengah diincar Belanda untuk dijadikan lahan-lahan perkebunan. Sehingga

ada ikatan emosional untuk bersama-sama melakukan perlawanan mengusir Belanda. Tuan Rondahaim sendiri, bahkan belajar ilmu pemerintahan adalah dari Tengku Muhammad Nurdin, Raja Padang semasa masih mudanya. (Mansen Purba; 1984:110)

Persahabatan dengan Raja Sisingamangaraja XII, menurut catatan Batara Sangti dalam bukunya Sejarah Batak, telah terjalin sejak tahun 1871. Waktu itu, Sisingamangaraja XII melakukan kunjungan ke negeri Raya, untuk membicarakan pertahanan dalam rangka menghadapi Belanda bersama Tuan Rondahaim dan Wakil Sultan Tengku Muhammad Ben dari Aceh. Kesepakatan mereka adalah mengatur siasat perang menghadapi Belanda dengan sistem perang gerilya, di mana pasukan kecil yang mudah bergerak melakukan bumi hangus terhadap sasaran yang dikehendaki.

Disebutkan, pada tahun 1883, waktu Raja Sisingamangaraja XII merebut Balige dari Belanda, Tuan Rondahaim membawa pasukan militernya sebanyak 40 perahu (sekitar 2000 orang) (Batara Sangti; 1973: 175). Kemudian berikutnya, melawan Belanda bersama dengan tentara Sultan Deli di daerah Padang Bedagei serta membumihanguskan bangsal-bangsal perkebunan milik Belanda dan Inggris. Hal seperti ini terus dilakukan secara bergerilya, yang membuat pasukan Belanda sering kewalahan.

Hubungan persekutuan Rondahaim dengan Sisingamangaraja XII terus terjalin. Namun begitu, keduanya tetap saling menghormati kewibawaan masing-masing. Pernah terjadi, sekitar tahun 1885, saat perang Sipolha, pasukan Rondahaim menarik diri karena prajurit Samosir

dari Simanindo yang merupakan pengikut Sisingamangaraja XII datang membantu Tambun Raya.

Sebaliknya pada 1868, waktu terjadi perang di Dolog Panribuan, Raja Sisingamangaraja XII memerintahkan Tengku Muhammad menggantikan Tengku Raja memimpin prajurit Aceh membantu Rondahaim mengalahkan Dolog Panribuan dan Sigarantung. Pada tahun 1889, dalam perang Urung pane, parajurit-prajurit dari Samosir membantu Tuan Rondahaim menyerang Urung Pane, yang dianggap penghalang bagi hubungan antara prajurit Raya dengan Samosir.

Dengan Kesultanan Aceh, pada tahun 1877 Rondahaim pernah meminta bantuan untuk menghadapi pasukan Belanda saat terjadi pertempuran di Dolok Merawan yang kedua kalinya. Hal itu dilakukan mengingat serangan yang sangat sengit pasukan Belanda yang datang dari Tebing Tinggi sehingga menimbulkan banyak korban di pihak Raya.

Menurut catatan J. Wismar Saragih, permintaan pasukan itu dilakukan sebanyak dua kali. Pertama sebanyak 30 orang dan kedua kalinya 40 orang. Prajurit Aceh ini, kemudian dipergunakan Tuan Rondahaim untuk membantunya dalam perang-perang berikutnya melawan Belanda maupun dalam upaya menertibkan wilayah-wilayah kerajaanya di Simalungun. Sementara, hubungan dengan kerajaan di Tanah Karo telah terjalin sejak tahun 1877, khususnya dalam perang melawan Belanda, yang disebut perang Padang II (J.Wismar Saragih; 1935: 74)

Perlawanan rakyat Simalungun makin melemah terutama setelah panglima perangnya, Tuan Rondahaim, yang terkenal gigih dan bengis

menghadapi Belanda, wafat pada tahun 1889. Sebelum meninggal dalam peperangan tahun 1888, Rondahaim sempat tertembak oleh tentara Belanda yang mengakibatkan timbulnya komplikasi penyakit serta kelelahan yang dialaminya selama berjuang. Usianya yang semakin uzur, membuat kesehatannya semakin menurun. Tuan Rondahaim baru dimakamkan secara adat sesuai dengan tata krama pemakaman Raja-raja Simalungun pada tahun 1892. Pada saat pemakamannya, utusan Belanda turut hadir memberi kata sambutan dan mengungkapkan kembali penilaian mereka terhadap Tuan Rondahaim yang mereka gelari, Napoleon van Batak.

Intervensi Belanda Terhadap Raja-raja di Simalungun

Meskipun terus-menerus melakukan perlawanan, upaya rakyat Simalungun mengusir Belanda akhirnya kandas. Hal ini terutama disebabkan tidak seimbangya peralatan yang dimiliki, dibanding dengan peralatan milik Belanda. Selebihnya, politik adu domba (*devide et impera*) yang dilakukan Belanda terhadap raja-raja Simalungun, mempercepat aneksasi Belanda di Simalungun, terutama dalam rangka memperluas lahan-lahan perkebunannya.

Belanda terus-menerus berupaya mendesakkan kehendaknya untuk menguasai Simalungun dengan cara mendekati raja-raja yang memiliki otoritas kekuasaan terhadap tanah-tanah yang akan mereka peruntukkan bagi lahan perkebunan. Bahkan Belanda dengan terang-terangan melakukan intervensi terhadap jalannya pemerintahan di kerajaan-kerajaan Simalungun.

Penetrasi Belanda atas kerajaan-kerajaan Simalungun semakin meluas sejak 1888 di mana Controleur Kroesen sempat jadi pelaksana pemerintahan di Siantar. Tuan Sang Naualuh pada masa itu masih berumur 17 tahun, sedangkan pelaksana pemerintahan sehari-hari adalah Bah Bolag, Tuan Anggi dan Radja Hitam. Pada tanggal 16 September 1888 Siantar menyatakan tunduk kepada Belanda. Perselisihan antara Tuan Marihat dengan Tanah Jawa dan Tanjung Kasou berhasil diselesaikan oleh Kroesen.

Pada tanggal 20 Juli 1889 Radja Maligas Tuan Djintar Sinaga dinobatkan sebagai raja Tanah Jawa dan menyatakan tunduk kepada Belanda. Hampir seluruh partuanan Kerajaan Tanah Jawa menyatakan tunduk kepada raja Tanah Jawa yang sudah dipengaruhi oleh Belanda kecuali Tuan Raimbang Sinaga tuan Dolog Panribuan yang menyatakan keluar dari Tanah Jawa. Kerajaan Panei juga takluk tahun 1890 pada masa Tuan Djontama Purba Dasuha.

Sedangkan, Raja Siantar Tuan Sang Naualuh Damanik menunjukkan oposisinya terhadap kekuasaan Belanda, sampai akhirnya Belanda menginternir raja Simalungun yang beragama Islam ini beserta dengan pejabat kerajaan Bah Bolag dan keluarganya ke Bengkalis. Berturut-turut pada tahun 1891-1896 Partuanon Raya juga takluk setelah Tuan Rondahaim meninggal dunia pada 1891 dan digantikan oleh puteranya Tuan Soemajan Saragih Garingging serta Partuanon Purba pada masa pemerintahan Tuan Rahalim Purba Pakpak dan Silimahuta pada masa Tuan Pamoraidup (Purba) Girsang.

Pasifikasi Belanda Terhadap Raja-raja Simalungun

Pasifikasi (penertiban) daerah Simalungun ditata menurut aturan pemerintahan Hindia Belanda (Binnelands Bestuur van Nederlandsch Indie). Bersama dengan Tanah Karo (Karolanden), Simalungun dijadikan satu afdeeling, yang disebut Afdeeling Simeloengoen en Karolanden yang dikepalai oleh Asistent Resident V. C. J. Westenberg, berkedudukan di Saribudolog dengan Besluit No. 22 tanggal 12 Desember 1906 (Staatsblad No. 531).

Afdeeling dibagi lagi menjadi onderafdeeling Simeloengoen dan onderafdeeling Karolanden. Onderafdeeling dikepalai pula oleh seorang controleur, yang untuk Simalungun mula-mula berada di Pardagangan Tomuan dan selanjutnya pada bulan Juni 1907 dipindahkan ke Pematang Siantar. Sedangkan untuk Tanah Karo, kedudukan controleur yang semula di Saribudolog juga dipindahkan ke Kabanjahe berdasarkan Besluit No. 22 tanggal 14 Februari 1911.

Pada 1915 Afdeeling Simeloengoen en Karolanden ditetapkan bagian dari Provinsi Sumatera Timur (Residentie Ooskust van Sumatra) yang dibentuk oleh Belanda tahun 1873 dengan kedudukan residen mula-mula di Bengkalis dan tahun 1887 dipindahkan ke Medan sehubungan dengan pembukaan perkebunan di Sumatera Timur.

Pada tahun 1864 di Deli, Belanda sudah menempatkan perwakilannya J.A.M. van Cats de Roet. Mula-mula Belanda berkeinginan untuk memisahkan Riau dari Sumatera Timur sebagai residensi tersendiri, namun dengan pertimbangan politis, akhirnya dibatalkan. Setelah Perang Batak (Bataksche Oorlog) tahun 1872 usai, maka Keresidenan Sumatera

Timur pun dibentuk secara resmi dengan ketetapan Gubernemen tanggal 15 Mei 1873 dengan Besluit No. 13, Staatsblad No. 81 tahun 1873 dengan memasukkan Kesultanan Siak dan daerah-daerah vasalnya dengan Bengkalis sebagai ibukotanya. Residen Sumatra Oostkust (Provinsi Sumatera Timur) yang pertama adalah S. Locker de Bruyne. (Mahadi; 1976: 48-49)

Onderafdeeling Simeloengoen sejak pasifikasi ditahun 1907-1909 terdiri dari tujuh lanschap (kerajaan) yakni: Kerajaan Panei, Dolog Silou, Siantar, Tanah Jawa, Raya, Purba dan Silimahuta. Sampai dihapuskannya landschap (kerajaan) di Simalungun pada waktu pecahnya Revolusi Sosial 1946, terdapat tujuh pemerintahan tradisional di Simalungun yang disebut raja Marpitu (Jahutar Damanik;1981: 74)

Belanda membagi wilayah kerajaan-kerajaan Simalungun itu ke dalam distrik dan setiap distrik dibagi dalam onderdistrik, sesuai dengan kebutuhan dan batas-batas tradisionalnya. Sampai tahun 1942 Onderafdeeling Simeloengoen terdiri dari 16 distrik yang dikepalai oleh kepala distrik (tungkat ni harajaan) yang berafiliasi kepada masing-masing pematang ni harajaan (ibukota kerajaan).

Kota Pematang Siantar yang adalah ibukota Kerajaan Siantar dan kedudukan asistent resident Afdeeling Simeloengoen en Karolanden ditingkatkan statusnya menjadi gemeente (daerah otonom) dengan ketetapan ordonansi No. 14 tanggal 27 Juni 1917, Staatsblad No. 285, sedangkan pengaturan anggaran belanjanya ditetapkan dengan ordonansi tanggal 27 Juni 1917 dan Staatsblad No. 290 oleh dewan kota (Raad) dengan persetujuan kepala pemerintahan daerah (Hoofd van Gewestelijk Bestuur).

Raad terdiri dari sembilan orang anggota dengan 5 orang Eropa, 3 orang pribumi (inlanders) dan 1 orang pribumi Timur Asing (Oostersche Vreendeling). Asistent Resident berkedudukan sebagai ketua dewan kota (voorzitter van de Raad) (J.Tideman; 1922: 223-224). Untuk keperluan pembangunan kantor, Belanda meminta tanah dari Raja Siantar. Hibah tanah untuk kota Pematangsiantar akhirnya diberikan tahun 1923 oleh raja Siantar Tuan Riah Kadim (Waldemar) Damanik putera Raja Sang Nualuh yang dibuang Belanda ke Bengkalis. (Jahutar Damanik; 1981 :49).

Masing-masing Kerajaan Simalungun itu melakukan perjanjian sebagai berikut: Kerajaan Panei, Raya dan Silimakuta pada tanggal 4 September 1907, Poerba dan Tanah Djawa pada tanggal 6 September 1907, Dologsilou pada tanggal 10 September 1907 dan Siantar tanggal 16 Oktober 1907 (J. Tideman; 1922: 48-49). Sejak saat itulah pemerintahan raja-raja di Simalungun mengalami perubahan kedaulatan. Sampai dihapuskannya sistem kerajaan di Simalungun pada waktu pecahnya Revolusi Sosial 1946, terdapat tujuh pemerintahan tradisional di Simalungun yang disebut Raja Marpitu..

KESIMPULAN

Pendekatan Belanda yang bermaksud menganeksasi (menguasai) wilayah Simalungun untuk dijadikan lahan perkebunan (cultuurgebied) dengan cara melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap Raja-raja Simalungun guna memperoleh konsesi, menjadi penyebab timbulnya perlawanan dari Raja-raja Simalungun, yang salah satunya adalah Tuan Rondahaim. Apalagi, Belanda tidak menghargai kedaulatan raja-raja Simalungun yang sudah ada sebelumnya.

Tuan Rondahaim yang diangkat sebagai Raja Goraha pada Harungguan Bolon Raja Marropat di Tiga Runggu sejak tahun 1865 gigih melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sejak saat inilah perlawanan rakyat Simalungun terhadap Belanda secara terbuka dilakukan. Berbagai strategi dilakukan, termasuk penguatan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya agar kekuatan tidak mudah dicerai-beraikan, tetapi memiliki persepsi bersama untuk menghadapi Belanda.

Hingga akhir hayatnya tahun 1889, Rondahaim tak pernah mengaku tunduk kepada Belanda. Sebaliknya Belanda juga tak berani menduduki wilayah Simalungun selama Tuan Rondahaim masih hidup. Terbukti, hingga sekarang, bekas partuanon Raya, tidak ada perkebunan-perkebunan seperti di daerah-daerah lain di Simalungun. Gencarnya perlawanan rakyat Simalungun yang dipimpin Tuan Rondahaim tetap tak berhasil menghentikan keinginan Belanda.

Apalagi akhirnya Belanda berhasil menaklukkan raja-raja Simalungun, dengan membuat perjanjian pendek (Korte Vorklening) yang banyak menguntungkan Belanda. Hal ini menandai terjadinya perubahan kedaulatan pemerintahan di Simalungun. Dengan demikian, berakhirilah perlawanan rakyat Simalungun terhadap Belanda, yang telah diperjuangkan Tuan Rondahaim selama 24 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Agustono, Budi., Suprayitno., dkk. (2012). Sejarah Etnis Simalungun. Pematangraya: Pemkab Simalungun.

Damanik, Jahutar. 1974. Jalannya Hukum Adat Simalungun. Medan: PD Aslan.

Damanik, Jahutar, 1981, Raja Sang Nauluh: Sejarah Perjuangan Kebangkitan Bangsa Indonesia. Bina Budaya Simalungun. Medan.

Kartodirdjo, Sartono. 1975. Sejarah Nasional Indonesia (Jilid IV). Jakarta: Grafitas.

Kartodirdjo, Sartono. 1987. Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: Dari Emporium Sampai Imperium (Jilid 1). Jakarta: Gramedia.

Madjid, Dien M., Johan Wahyudi. (2014). Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar. Jakarta: Prenada Media Group.

Mahadi. 1976. Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu atas Tanah di Sumatera Timur (1800-1975). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Purba, D.Kenan., JD. Poerba. 1995. Sejarah Simalungun. Bina Budaya Simalungun. Parsadaan Ni Purba Pakpak, Boru Pakon Panogolan. Jakarta.

Purba, Mansen. 1993. Rondahaim: Sebuah Kisah Kepahlawanan Menentang Penjajahan di Simalungun. Medan: Bina Budaya Simalungun.

Purba, MD. 1977. Mengenal Kepribadian Asli Rakyat Simalungun. Medan: MD. Purba.

Purba, MD. 1982. Mengenal Sang Nauluh Damanik Sebagai Pejuang. Medan: MD.Purba.

Sangti, Batara. 1977. Sejarah Batak. Balige: Karl Sianipar Company.

Sijabat,WB. 1982. Ahu Sisingamangaraja. Jakarta: Sinar Harapan.

Sinaga, K.E (Kolektor, Naskah Ketikan). Turi-turian Parpandangan Na Bolag. Pematangsiantar.

Sinaga, Maknur (tim). 1999. Sejarah Perkembangan Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Daerah Tk II Simalungun. Pemda Simalungun. Pematangsiantar.

Sjamsuddin, Helius. (2007). Metodologi Sejarah. Jakarta: Ombak.

Suroyo, A.M. Djuliaty. 2000. Eksploitasi Kolonial Abad XIX, Kerja Wajib di Keresidenan Kedu 1800-1890. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.

Tambak, TBA. Purba. 1982. Sejarah Simalungun. Pematangsiantar: Percetakan HKBP.

Tideman, J. 1922. Simeloengoen: Het Land der Timoer Bataks in Jizn Vroegere Isolatie en Zijn Ontwikkeling tot Een Deel van het Cuulturgebed van de Oostkust van Sumatra. Stamdruckerij Louis H. Becherer. Leiden.